

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEMITRAAN INDUSTRI
BATIK RUMAHAN ‘BATIK MOCH. SALAM’ DI DESA NGARESREJO,
KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO**

Endang Indartuti
FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
indartuti65@gmail.com

Radjikan
FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

Batik is one of the Indonesia characteristics and cultural heritages. It is the Government's responsibility to develop batik in accordance with the local characteristics of each region. At the same time, it is the opportunity for the batik producers around the archipelago to utilize the moment. The purpose of these activities are: the procurement of printing equipment and a table cap in accordance with the desired design pattern; skills training using the tool, with the direct learning methods applied; training and helping for business management and simple bookkeeping; assisting the marketing process through training techniques and marketing strategy; making the media marketing.

The applied methods are: identifying the problem and needed equipment, such as: a molding tool/ stamp, tasting table for batik, stove to the tasting table, printer wok batik; skills training in using the tools, forming the simple bookkeeping, making media marketing. The taken approach is a direct method of learning and working with participatory methods.

Results and implications: the procurement of 4 printing tools following the pattern of SMEs, provision of 2 sets consisting of: Tables stove, printer wok, gas stove, regulator, gas hose, 12 Kg LPG Tube, a marketing tool. They have been handed over to the SMEs. It had been done the technical training activities and business management training and simple bookkeeping. The existence of tools increase the number of batik production more than ever.

Keywords: *conservation, creativity, productivity, motif, batik*

A. PENDAHULUAN

Batik telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Perlakuan terhadap karya batik ini dimanifestasikan dengan mewajibkan mengenakan pakaian batik kepada seluruh pegawai negeri sipil pada hari tertentu. Kewajiban mengenakan batik itu dilakukan baik pada saat upacara, pertemuan, maupun pada saat bekerja di kantor. Batik dengan demikian lantas menjadi *trend* di mana-mana. Ini tidak terkecuali juga mempengaruhi generasi muda yang tidak malu lagi mengenakan batik.

Momentum yang terjadi ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh para perajin batik nasional dengan sebaik-baiknya. Industri batik sebagai salah satu

bagian dari industri garmen memperoleh peluangnya di antara jenis-jenis pakaian yang lain. Industri batik berhasil menggerakkan perekonomian. Berbagai faktor produksi mulai dari pengadaan bahan baku, *manufacture*, *home industry*, perajin, distribusi hingga konsumsi telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor industri garmen nasional.

Fenomena bangkitnya batik menjadi pakaian kebanggaan nasional ini terjadi juga pada perajin batik di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Gejala *booming* batik ini membuat daerah yang tadinya belum memiliki motif batik khas daerah, mulai menelusuri motif batik warisan leluhur atau nenek moyangnya dulu. Di lain pihak bagi daerah yang tidak memiliki warisan motif khas daerah dari leluhurnya mulai mereka cipta motif khas daerah tersebut.

Hal demikian merangsang para perajin untuk kreatif dan inovatif di dalam mencipta motif-motif batik daerah mereka, karena disadari setiap daerah akan lebih bagus bila memiliki ciri khas yang dapat merepresentasikan *local wisdom* daerahnya masing-masing. Hal yang sama terjadi juga pada para perajin batik di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Saat ini di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki sentral kegiatan industri batik, yang dinamakan ‘Kampung Batik’ Sidoarjo. Kawasan ini secara konsisten terus mengembangkan dan melestarikan batik motif khas daerah Sidoarjo.

Salah satu perajin tersebut adalah seorang yang bernama M. Kusaini. Perajin ini berasal dari Kampung Jetis, Kabupaten Sidoarjo. Sejak muda hidupnya diabdikan pada profesi sebagai perajin batik. Dengan keahlian yang dimilikinya ia mengembangkan usaha batik dengan nama ‘Batik Moch. Salam’ di Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Di samping memiliki showrom kecil-kecilan, rumah yang menjadi tempat tinggalnya juga dijadikan tempat produksi batik, sekaligus sebagai tempat kerja praktek dari anak-anak sekolah.

Selain dorongan ekonomi, Kusaini juga didorong oleh sebuah harapan atas pelestarian batik sebagai warisan leluhurnya. Ia memiliki harapan terhadap generasi muda untuk mau belajar membatik. Tujuannya adalah terjadinya perubahan pandangan masyarakat atas kerajinan batik, di mana kerajinan batik yang tadinya dianggap sebagai kegiatan kuno, sulit pengerjaannya, dan hanya bisa dilakukan oleh para orang tua, menjadi sangat mungkin dikerjakan juga oleh generasi muda dan dianggap sebagai kegiatan kreatif, sehingga kesan yang lahir adalah “batik itu indah dan mudah”.

Motif batik yang ada sementara ini sebagian besar dikembangkan dengan motif bunga dan ikan bandeng-udang. Motif-motif tersebut telah berhasil menjadi ciri khas batik asal Kabupaten Sidoarjo. Di luar motif yang ada, para perajin batik Sidoarjo ini juga menerima motif lain sesuai pesanan, biasanya dikombinasi dengan warna terang. Batik pesanan ini seringkali untuk dijual kembali. Sebagian di antaranya dipesan dari masyarakat baik penjual, pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan dari koperasi sekolah digunakan untuk seragam.

Pada praktiknya kegiatan Kusaini ini tidak hanya memperoleh profite benefide saja, namun kegiatannya juga mendapatkan berbagai kendala, di antara permasalahan yang dihadapi itu adalah proses pembuatan batik tulis.

Batik tulis ini prosesnya memakan waktu yang lama dan biaya produksinya kelewat tinggi, sehingga ini berpengaruh pada harganya yang mahal. Di sisi lain, pesanan dari masyarakat kelas menengah ke bawah saja masih belum juga bisa terpenuhi.

Berbagai persoalan tersebut berusaha diselesaikan oleh Khusaini dengan solusi kemitraan. Hal tersebut dapat dilihat ketika Khusaini menjalin kemitraan dan bersepakat dengan mitranya untuk mengatasi permasalahan dalam pembuatan maupun pengadaan alat cetak, meja cap, peningkatan kreatifitas pola desain, pengelolaan usaha, pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha dan pengadaan pembukuan sederhana serta peningkatan pemasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan, bagaimanakah efektifitas pelaksanaan kebijakan kemitraan industri batik rumahan 'Batik Moch. Salam' di Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo?

B. TEORI DAN KONSEP

Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (kamus besar bahasa indonesia). Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

James E. Anderson (1979: 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun kebijakan publik tersebut dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor dari luar pemerintahan. Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut mengandung makna kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut, 1) Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya, apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan, bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah, 2) Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan, 3) Penetapan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan, 4) Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang

mereka kerjakan, apa dampak dari isi kebijakan, 5) Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak suatu kinerja diukur, siapa yang mengevaluasi kebijakan, apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 menyatakan bahwa Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil yaitu: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.

Konsep Kinerja

Konsep kinerja dapat dilihat dari kacamata individu dan kelompok (organisasi). Di mana kinerja individu mempunyai makna hasil kerja perseorangan (input-output) dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dengan berbagai macam pendekatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Definisi kinerja menurut berbagai macam ahli; Rue & Byars (1981:375) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Murphy & Cleveland (1995:113) mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha (1997:112) mengatakan kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Lembaga Administrasi Negara LAN-RI (1999:3) merumuskan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja yang akan dan telah dicapai secara kualitas dan kuantitas oleh seseorang maupun organisasi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari berbagai definisi, maka dapat disimpulkan kinerja memiliki beberapa elemen penting yaitu: a) Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, b) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan kewenangan dan tanggung jawab sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik, c) Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga harus mengikuti aturan yang berlaku. Pekerjaan tidaklah bertentangan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang

ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut harus sesuai dengan moral dan etika yang berlaku di lingkungan sekitar.

Menurut Dwiyanto (2006:50), menjelaskan ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur Kinerja Birokrasi Publik, a) **Produktivitas**, yaitu mengukur kinerja dengan tingkat efisien dan efektifitas pelayanan publik, b) **Kualitas layanan**, yaitu meningkatkan kualitas pelayan publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik, c) **Responsivitas**, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengetahui dan menangkap kebutuhan yang dirasakan oleh publik. Dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, d) **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kinerja birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar terhadap Kebijakan birokrasi baik secara eksplisit maupun implisit. “terkadang responsibilitas bisa saja berbenturan dengan responsivitas, e) **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk pada seberapa besar Kebijakan dan Kinerja birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Publik konsisten dengan kehendak publik. “Kinerja Birokrasi publik tidak hanya dapat dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah. Kinerja sebaiknya dilihat dari sudut ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam Buku Agus Dwiyanto “*Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*” setiap aspek dalam struktur birokrasi, selain memiliki manfaat dan kontribusi dan efisiensi dan kinerja birokrasi, juga berpotensi untuk menimbulkan penyakit birokrasi. Terjadinya penyakit birokrasi dalam kinerja birokrasi, jika intensitas dari variabel itu sudah menjadi berlebihan, sehingga menimbulkan tugas dan fungsi yang berbeda. Birokrasi publik di Indonesia yang memiliki hierarki ketat, panjang, dan cenderung mendorong para pejabatnya untuk menegembangkan ABS memperoleh justifikasi dari lingkungannya karena budaya masyarakat Indonesia yang Paternalistis.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah keberhasilan yang dicapai terhadap tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai efektivitas diperlukan suatu usaha agar apa yang menjadi sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat (1994, h. 16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu menurut Hidayat (1986) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sebagai ukuran yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan suatu target, di mana target tersebut menjadi sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada setiap individu yang menilai. Setiap individu memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda sehingga berpengaruh pada penilaian yang diambil. Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985, h.53) menyatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu a) Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : 1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, 2) Sasaran yang merupakan target kongkrit, dan 3) Dasar hukum, b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut pada proses sosialisasi, c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adapun beberapa faktor dalam adaptasi, yaitu : 1) Peningkatan kemampuan, dan 2) Sarana dan prasarana.

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Pembinaan dan Pemberdayaan pengrajin batik di Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono, (2) Pelatihan pembukuan dan ketrampilan penggunaan alat (3) Manfaat dan dampak yang dihasilkan dari pembinaan dan pemberdayaan pengrajin batik.

Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut *Miles* dan *Huberman* yang dikutip Sugiyono (2013, h.91) ada tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang ditawarkan dan target luaran, maka metode pelaksanaannya adalah sebagai berikut: a) Melakukan identifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra perajin batik melalui metode survey awal, wawancara dengan mitra dan observasi melihat beberapa pembatik waktu melakukan kegiatan, untuk mengetahui permasalahan yang paling mendesak, b) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam masalah krusial yang harus segera diatasi seperti pengadaan teknologi tepat guna, alat cetak/cap, meja pengecapan untuk pembatikan, meja kompor untuk pengecapan, wajan cap pembatikan, Mengidentifikasi permasalahan dalam pelatihan ketrampilan pemakaian alat dan pelatihan pembukuan sederhana, pembuatan media pemasaran.

D. PEMBAHASAN

Tiga Pilar Pembangunan Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, secara garis besar mempunyai 3 bidang andalan yang siap diracik menuju panggung dunia (*Human Resources*, industri mikro-makro, dan sektor perikanan). Berdasarkan hasil dari pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo, adalah 1.945.252 orang. *Capital* nominal yang besar itu harus ditunjang oleh kualitas yang memadai. Tujuannya sederhana, yakni agar masyarakat Sidoarjo bisa kompetitif di tataran internasional. Perlu dicatat, semakin tinggi Index Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi pula produktivitas kerja yang akhirnya melapangkan jalan mengarah ke pentas internasional. SDM memiliki peran sentralis sebagai pelaku maupun sasaran pembangunan.

Selanjutnya dilihat dari sudut pandang keindustrian, masa depan Kabupaten Sidoarjo sebenarnya terhitung bagus. Industri di Sidoarjo terkonfigurasi ke dalam 3 (tiga) sektor dominan, yaitu sektor pengolahan, perdagangan, dan angkutan. Ketiga-nya menyumbang *cost* yang tidak sedikit terhadap PDRB.

Terhadap industri mikro memang perlu perhatian lebih (prioritas). Namun, “prospek” industri kreatif juga tak boleh dianggap remeh. PR Pemerintah Sidoarjo ada dua. Pertama, menciptakan kemandirian bagi setiap kategori industri, terutama industri mikro dan kreatif. *How to make it?* Misalnya dengan mengelompokkan industri hulu hingga hilir, memberi pinjaman usaha berbunga rendah, dan rutin mengadakan bimbingan. Khusus untuk cara yang terakhir, Dirjen Industri Kecil sendiri telah melaksanakan BPIK. Hal itu tentu akan lebih baik apabila juga diterapkan secara lokal di Sidoarjo. Kedua, *policy maker* “wajib” menjaga kelanggengan relevansi antara unit usaha mikro dan makro. Substansinya, jangan biarkan keduanya sampai “saling bunuh” untuk bertahan layaknya model pasar bebas (tanpa kontrol pemerintah).

Terakhir, perihal “sektor perikanan”. Sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2010, Perda tentang Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terbit dan upaya penerapannya sudah cukup baik. Tapi juga harus ada alternatif (*thinking outside the box*), agar sektor tersebut semakin berkembang dan *sexy* untuk investor asing. Misalnya saja: mengadakan festival industri perikanan dunia, membuat “pusat industri ikan dan olahan ikan”, serta menyelenggarakan pameran produk perikanan secara konsisten. Akhir kata, harmonisasi sektor perikanan dengan dua sektor primer lainnya di atas adalah *blue print* ideal demi Sidoarjo *Go Internasional*.

Lima Kebijakan Pengembangan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengusung 5 langkah kebijakan bagi pemberdayaan secara optimal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah hingga 2014 yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang. Lima langkah kebijakan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) tersebut masing-masing meningkatkan iklim usaha kondusif bagi KUMKM, mengembangkan

produk pemasaran KUMKM. Berikutnya, mengembangkan produk dan pemasaran bagi KUMKM, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia KUMKM, serta perkuatan kelembagaan koperasi. Untuk tugas tersebut, seluruh pejabat eselon I turut dilibatkan. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Untung Tri Basuki, mengatakan arah kebijakan penguatan kelembagaan koperasi ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai dengan nilai dan jati diri koperasi. Selain itu, untuk meningkatkan peran koperasi dan memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota sesuai prinsip dan asas koperasi, ujar Untung Tri Basuki kepada Bisnis, hari ini. (*Marto Agus, Diakses melalui <http://kabarbisnis.com/read/2841689>. Diakses pada 15 September 2013*).

Menurut dia, alur pikir kerangka pemberdayaan KUMKM dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pemberdayaan pelaku KUMKM. Namun pada tahap pertama kerangka kerja itu dilaksanakan hingga 2014. Tema yang diusung hingga 2014 adalah bangkitkan daya saing KUMKM. Kemudian visi pengembangannya adalah KUMKM sehat dan kuat sesuai dengan *key development milestones* atau tonggak utama pembangunan. Adapun target utama dalam *key development milestones* melalui peranan KUMKM mencakup peningkatan nilai ekspor hingga 20%. Kemudian peningkatan koperasi berkualitas sebesar 2% per tahun, sistem informasi KUMKM secara online. Selanjutnya mendistribusikan dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun per tahun, menciptakan 1.000 sarjana wirausaha baru per tahun, menetapkan 3 koperasi skala besar pada setiap provinsi dan menyelesaikan pengembangan 100 program *one village one product* (OVOP). Hingga saat ini, peranan pelaku KUMKM terhadap ekspor non migas, masih sekitar 17%, oleh karena itu Kemenkop dan UKM berupaya mendorong partisipasi pelaku usaha sector riil hingga sebesar 20%.

Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri, Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut Tambunan (2002, h.73) masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil yaitu sebagai berikut: masalah kesulitan pemasaran, masalah keterbatasan finansial, masalah keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku, dan masalah keterbatasan teknologi.

Jika dilihat dari peran pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ini, mengatakan bahwa sudah jelas perlunya peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam sektor industri kecil agar tetap berperan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang semakin baik dan seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 14

yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu dalam bentuk: (1) Fasilitasi permodalan, (2) Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi, (3) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (4) Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar, (5) Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah, (6) Fasilitasi HAKI.

Alur pikir kinerja kemitraan adalah sebagai berikut:



Gambar Alur Pikir Kinerja Kemitraan

- 1) Melakukan koordinasi dengan UKM di Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono yang menjadi Mitra, yaitu Bapak Kusnaini mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Tahap berikutnya segera dilakukan survey untuk pengadaan barang peralatan yang akan di Introdusir Kepada UKM Mitra dan yang segera dibutuhkan oleh Mitra UKM Batik kemudian kami membeli peralatan dan kebutuhan untuk UKM dan segera melakukan Pelatihan dan pendampingan Adapun dengan dana yang ada hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

**Hasil yang telah dicapai di Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Sidoarjo**

No	Rencana	Realisasi
1	Pengadaan 4 alat cap dengan motif yang diinginkan oleh UKM	Pengadaan 4 alat cap dengan motif yang diinginkan oleh UKM sudah diserahkan terimakan pada UKM
2	Pengadaan 2 set yang terdiri dari: Meja Kompur, Wajan Cap, Kompur Gas, Regulator, Slang Gas, Tabung Gas Ukuran 12 Kg yang akan digunakan oleh UKM untuk kegiatan pengecapan	Pengadaan 2 set yang terdiri dari: Meja Kompur, Wajan Cap, Kompur Gas, Regulator, Slang Gas, Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sudah diserahkan terimakan pada UKM
3	Melaksanakan kegiatan Teknis pelatihan cara membatik dengan menggunakan alat cap, Pengelolaan Usaha (teknik pemasaran dan pengembangan ekonomi), dan Pembukuan sederhana	Melaksanakan kegiatan Teknis pelatihan cara membatik dengan menggunakan alat cap. Untuk mempercepat waktu pematikan dan memberikan pelatihan pengelolaan usaha serta pembukuan sederhana telah dilakukan
4	Pengadaan Banner dan brosur	Brosur dan Banner sudah diserahkan terimakan pada UKM.
5	Menyusun laporan kemajuan	Tersusunnya laporan kemajuan

E. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Kemitraan antara usaha batik di Sidoarjo dengan Perguruan Tinggi ternyata efektif membantu masyarakat UKM dalam mengembangkan usahanya.
- 2) Kemitraan dalam bidang pelatihan ternyata membuat para pengrajin memiliki pengetahuan dan keterampilan serta motivasi yang lebih tinggi untuk terus meembangkan usahanya.
- 3) Kemitraan dalam pembuatan media pemasaran berupa brosur dan banner ternyata dapat membantu pemasaran semakin meluas.
- 4) Kemitraan dalam pembuatan desain yang semakin inovatif ternyata meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk yang semakin bagus.

Saran

Dari hasil penelitian tersebut di atas maka saran selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya pendampingan pada UKM untuk perkembangan usahanya lebih lanjut.
- 2) Perlu adanya pendampingan lebih khusus dalam strategi pemasaran
- 3) Perlunya bantuan atas akses atau peluang pasar pada UKM dengan menyusun media informasi tentang UKM Mitra untuk dicover dalam Web site Untag Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto (2011), *“Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi”*, Gramedia Pustaka Utama
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato. (2012), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Marto, Agus. (2013), *Perekonomian RI ditopang oleh Sektor UMKM*. Diakses melalui <http://kabarbisnis.com/read/2841689>, Diakses pada 15 September 2013.
- Mulyanto, Dede. (2006), *Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Musman, Asti dan Ambar, Arini (2011), *Batik: Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta: G-Media.
- Retnani, Setya, 2001, *Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Sidoarjo*. Jakarta
- Sugiyono. (2013), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus dan Nugroho, Trilaksono. (2008), *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Tambunan, Tulus. (2002), *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, Ari. (2011), *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*, Yogyakarta: ANDI.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Industri (c.1), Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (c.1), Jakarta, Bank Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Jakarta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (c.14), Surabaya,

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur.

....., 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Sidoarjo Angka Sementara*. Sidoarjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

Internet

....., *Mybatik.wordpress.com*

....., Makalah Pelatihan Batik Mojokerto, 2011

_____, 2012. *Pusat Olahsan Ikan Kabupaten Sidoarjo*. www.sidoarjokab.com. Diakses tanggal 6 Januari 2013.

_____, 2012. *Display Ekonomi PDRB Kabupaten Sidoarjo (Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah Harga Konstan)*, www.regionalinvestment.bkpm.go.id. Diakses tanggal 5 Januari 2013.

Setiawan, Indra. 2012. *Pemkab Sidoarjo Dukung Pengelompokan Industri*. www.antara.jatim.com. Diakses tanggal 5 Januari 2013.